
PERAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA HUBUNGAN REGULASI PERBANKAN DAN MANAJEMEN RISIKO: STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti* I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra Ni Nyoman Ayu Suryandari
Universitas Mahasaraswati

*E-Mail: rahayudamayanti8@gmail.com

DiPublikasi: 31/07/2017

Halaman: 90 - 100

DOI: 10.22225.KR.9.1.332.90-100

Abstract

Small banking risk was greatly influenced by obedience and the work of BPR about banking regulations made by the Government, as well as good management of Banking management. In particular the Bank Of the people in the municipality, there is still a lot of Denpasar BPR experiencing rates of ill health. In the municipality of Denpasar Bali Province in particular and in General that BPR-wheel drive is considered an economy in which SMALL MEDIUM ENTERPRISES sector has the type and character of the customer under a public Bank. By having characters less good clients under Bank's common rates BPR then greater risk compared to the General bank has a character that is better. Thus the achievement of low-risk management by BPR depends of good corporate governance and the regulation of the Government Of the people's Bank in the running. This study used a survey method on the Commissioner of banking sector (BPR) in the province of Bali. In this case the respondents will be asked to fill in a detailed questionnaire about banking regulations, Good Corporate Governance in order to be able to minimize the risk of the Bank Of the people of Bali. Data analysis using the Partial Least Square (PLS).

The results showed that the positive effect of banking regulations against risk management while the Good Corporate Governance is not a moderation between the variables influence the regulation of banking towards risk management. For the short term, the results of this research are expected to be contributing to the academics associated with the various factors that lead to the achievement of minimization of risk management. By understanding the factors that influence the minimization of risk management, are expected to reduce the BPR rate to poor health. For the long term, the results of this study are expected to provide input efforts that can be made by the Government in this regard OJK (Financial Services Authority) in addressing the poor health levels of BPR in Bali, improve regulation and GCG with the aim to be able to reduce the risk of BPR BPR and it undermines the customer to perform manipulation of banking so that banking risks becoming lower.

Keywords: *good corporate governance, government regulation, risk management*

Abstrak

Risiko perbankan yang kecil sangat dipengaruhi oleh berjalannya dan patuhnya BPR tentang regulasi perbankan yang dibuat oleh pemerintah, serta baiknya pengelolaan manajemen Perbankan tersebut. Khususnya Bank Perkreditan Rakyat di Kotamadya Denpasar yang masih banyak terdapat BPR yang mengalami tingkat kesehatan yang buruk. Di Kotamadya Denpasar khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya bahwa BPR dianggap merupakan penggerak roda perekonomian di sektor UMKM yang mana memiliki jenis dan karakter nasabah di bawah Bank Umum. Dengan adanya karakter nasabah yang kurang baik di bawah Bank Umum maka BPR memiliki tingkat Risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan nasabah bank Umum yang memiliki karakter yang lebih baik. Dengan demikian tercapainya manajemen risiko yang rendah oleh BPR sangat tergantung dari *good corporate governance* dan regulasi pemerintah dalam menjalankan Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode survei pada komisaris pada sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali. Dalam hal ini responden akan diminta untuk mengisi kuisioner mengenai regulasi perbankan, *Good Corporate Governance* dalam usahanya untuk dapat meminimalisasi Risiko Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan berpengaruh positif terhadap manajemen risiko sedangkan *Good Corporate Governance* bukan merupakan variabel moderasi antara pengaruh regulasi perbankan

terhadap manajemen risiko. Untuk jangka pendek, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi akademisi terkait dengan berbagai faktor yang menyebabkan tercapainya minimalisasi manajemen risiko. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minimalisasi manajemen risiko, diharapkan dapat mengurangi BPR yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk. Untuk jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengatasi buruknya tingkat kesehatan BPR di Bali, memperbaiki regulasi dan GCG dengan tujuan untuk dapat mengurangi risiko BPR dan mempersulit nasabah BPR untuk melakukan manipulasi perbankan sehingga risiko perbankan menjadi lebih rendah.

Kata Kunci: *Good corporate governance, regulasi pemerintah, manajemen risiko*

I. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran besar dalam perekonomian suatu daerah mengingathampir setiap transaksi ekonomi berhubungan dengan perbankan. Salah satu jenis bank yang melayani masyarakat dari sektor usaha mikro dan kecil adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Meskipun BPR memegang peranan penting dalam membantu perekonomian masyarakat kecil, namun penyebaran BPR di seluruh pelosok Indonesia belum merata. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2012, terdapat 1.653 BPR di seluruh nusantara yaitu sebanyak 1.184 BPR (71,6%) berada di wilayah Jawa Bali, dan sebanyak 469 BPR (28,4%) di wilayah luar Jawa Bali.

BPR didirikan dengan tujuan untuk melayani dan menyalurkan modal usaha, serta bekerjasama dan memfasilitasi masyarakat akan berbagai informasi tentang dunia usaha termasuk bagaimana mengembangkan usahanya. Tidak menutup kemungkinan BPR akan menghadapi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank apabila tidak dideteksi dan dikelola dengan sebagaimana mestinya. Para pimpinan puncak dalam manajemen bank harus mengerti dan mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya sehingga para manajer, pelaksana, dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum dari berbagai risiko yang muncul (Idroes dan Sugiarto, 2006). Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat menimbulkan penutupan usaha serta efek domino lainnya di masyarakat.

Data Bank Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan bahwa total kasus permasalahan perbankan lebih banyak terjadi pada BPR daripada bank umum. Terdapat 12 kasus pada 7 BPR, sedangkan bank umum hanya sekitar 6 kasus pada 4 bank umum. Rendahnya jumlah permasalahan yang terjadi pada bank umum dikarenakan pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Meskipun demikian, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang

mengharuskan BPR untuk memiliki ketentuan mengenai manajemen risiko. Oleh karena itu diperlukan suatu regulasi yang cukup ketat pada sektor perbankan untuk dapat melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk-produk dari industri perbankan tersebut, serta mengurangi peluang kegagalan bank.

Sesungguhnya eksistensi BPR di Propinsi Bali berkaitan dengan keberadaan usaha kecil dan menengah di berbagai pelosok daerah. Data yang diperoleh dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menunjukkan terdapat 137 bank yang tersebar di seluruh Kabupaten di Bali, ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Bali Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah BPR	Persentase
1.	DPK Gianyar	25	18,25%
2.	DBK Bali Timur	12	8,76%
3.	DPK Bali Utara/ Buleleng	6	4,38%
4.	DPK Bali Barat/ Tabanan	20	14,60%
5.	DPK Badung/Kuta	29	21,17%
6.	DPK Abiansemal	6	4,38%
7.	DPK Mengwi	17	12,41%
8.	DPK Kota Denpasar	22	16,06%
	Jumlah	137	100,00%

Sumber: Perbarindo (2016)

Lindgren *et al.* (1996) menyatakan banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat tidak sehatnya sektor perbankan. Sektor keuangan, terutama di negara-negara berkembang, masih didominasi oleh lembaga perbankan. Di Indonesia, misalnya, menurut Husein (2003), industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan. Apabila lembaga perbankan yang tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal dapat menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian. Kompleksitas dan permasalahan yang

dihadapi perbankan saat itu ditenggarai akibat berbagai kelemahan internal, dan diperburuk oleh faktor eksternal seperti gejolak nilai tukar, tingkat suku bunga yang tinggi serta ketidakpastian kondisi sosial politik. Kelemahan internal yang memberikan andil cukup signifikan adalah bersumber pada manajemen yang tidak independen serta rendahnya kompetensi dan integritas baik pengetola maupun pemilik bank.

Rendahnya kompetensi dan integritas manajemen bank mengakibatkan lemahnya penerapan manajemen risiko yang antara lain terlihat pada banyaknya pelanggaran ketentuan kehati-hatian dan penanaman dana pada sektor usaha yang berisiko tinggi serta strategi pendanaan yang tidak hati-hati. Keadaan ini diperburuk oleh pelaksanaan fungsi pengawasan internal bank yang belum berjalan secara optimal. Akhirnya kelemahan manajemen tersebut mempengaruhi kinerja perbankan yaitu ketidakseimbangan neraca baik pada sisi aktiva maupun pasiva.

Menurut Warjiyo (2006), pengawasan bank pada dasarnya menjadi tanggung jawab pengurus (pemilik dan pengelola) bank yang bersangkutan karena hal ini merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* dalam bank. Tingginya kompleksnya risiko perbankan ini menyebabkan diperlukan suatu praktek tata kelola bank yang sehat. Secara internal bank harus melakukan penerapan manajemen risiko yang baik. Meskipun Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sudah mengeluarkan peraturan demi peraturan tentang kewajiban menerapkan manajemen risiko, ternyata masih banyak bank yang meremehkan penerapan dari manajemen risiko. Sebagian besar bank di Indonesia tidak atau belum menerapkan sistem manajemen risiko secara formal. Topik penelitian ini penting dan menarik untuk diteliti kembali secara lebih mendalam untuk dapat mengeksplorasi pengaruh *good corporate governance* pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah regulasi perbankan berpengaruh pada manajemen resiko?
- 2) Apakah *good corporate governance* berpengaruh pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko?

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Risiko

Risiko merupakan bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau institusi untuk mencapai tujuannya (Tampubolon, 2004). Risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bank (Bank Indonesia, 2003). Risiko

ditetapkan agar bank memiliki sense adanya urgensi atau prioritas tinggi untuk mengatasi atau mengelola risiko yang terjadi. Ketika bank mencoba mengaplikasikan ke program manajemen risiko, maka semua kegiatan dan usaha yang dilakukan melibatkan kegiatan yang membutuhkan perhatian kewaspadaan penuh, pengetahuan yang dikembangkan, pengalaman yang cukup memadai, dan kemampuan serta energi yang diperbesar.

Risiko merupakan probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari return yang diharapkan, semakin besar menyimpang dari tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar pula tingkat risikonya (Sartono, 2000; Cade, 1997). Risiko merupakan peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak terhadap tujuan organisasi, diukur dengan memadukan antara dampak pengaruh yang akan ditimbulkan dan kemungkinan terjadinya.

Bagi lembaga keuangan seperti bank, risiko dapat muncul dari berbagai sumber di antaranya kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kecenderungan masyarakat baik dari sisi konsumsi maupun menabung, s'rtuasi pdlitik, perubahan harga, tata kelola bank dan kinerja keuangannya sampai faktor teknologi. Sementara menurut Siahaan (2007) risiko yang dihadapi organisasi seperti perbankan adalah:

- a. Risiko Keuangan (*Financial Risk*). Potensi terjadinya kerugian keuangan karena pemicunya dan luar organisasi, berupa faktor exogenous di luar kemampuan organisasi mengendalikannya adalah:
 - 1) *Interest Rate*: risiko kerugian karena perubahan suku bunga (misalnya suku bunga pasar naik 1 % atau turun),
 - 2) *Foreign Exchange*: risiko kerugian karena perubahan kurs valuta asing,
 - 3) *Credit*: risiko kerugian karena ada pihak yang default (cedera janji) tidak dapat mematuhi kewajibannya mengembalikan kredit tepat waktu, dan
 - 4) *Liquidity & Cash Flow*: risiko likuiditas dipicu ketidakmampuan internal organisasi menyediakan uang tunai.
- b. Risiko Strategi (*Strategic Risk*). Risiko-risiko dalam jangka panjang pemicunya adalah murni perubahan yang terjadi diluar organisasi seperti:
 - 1) *Competition*: risiko yang berasal dari persaingan (dari kompetitor),
 - 2) *Customer Change*: potensi risiko kerugian karena perubahan selera pelanggan atau pergeseran selera pelanggan yang menyebabkan penurunan penjualan

- organisasi,
- 3) *Industry Change*: perubahan industri karena inovasi atau munculnya teknologi baru,
 - 4) *Customer Demand*: potensi risiko kerugian karena pergeseran permintaan pelanggan yang mengakibatkan merosotnya penerimaan organisasi, dan
 - 5) *Merger & Acquisition Integration*: Integrasi beberapa perusahaan melalui merger dan acquisition. Ini tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal tetapi juga oleh internal organisasi.
- c. Risiko Operasional (*Operational Risk*). Murni akibat internal organisasi yaitu *Accounting Control*: risiko kerugian akibat pengendalian keuangan lemah karena kesalahan/kelalaian dalam pembukuan keuangan (sistem akuntansi).
- d. Risiko yang Dipicu Kondisi Fisik dan Non fisik (*Hazard Risk*). Risiko ini ada bersumber sekaligus dari internal dan eksternal organisasi:
- 1) *Public Access*: jalan mendapatkan informasi masyarakat luas,
 - 2) *Employee*: produktivitas karyawan mungkin menurun drastis karena pengaruh internal dan eksternal organisasi yang menimbulkan kerugian
 - 3) *Properties*: harta organisasi mungkin mengalami kemunduran daya tarik baik secara teknis maupun secara ekonomis, yang menyebabkan kerugian bagi organisasi, dan
 - 4) *Product & Service*: perubahan kondisi barang atau jasa yang diproduksi mungkin bersumber dari internal dan eksternal yang dapat menimbulkan kerugian.

Yang perlu menjadi penekanan di sini adalah bahwa manajemen risiko bukan untuk menghilangkan risiko. Manajemen risiko ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang ada berada pada tingkat yang bisa diterima. Ini penting karena bisnis bank adalah mengelola risiko. Perlu diingat risiko dan hasil adalah dua hal yang menyatu seperti dalam sisi mata uang koin. Ekspektasi hasil yang tinggi selalu diikuti dengan risiko yang lebih tinggi juga dan sebaliknya

2. Regulasi Perbankan

Bank adalah institusi keuangan yang paling terkait dengan regulasi (Mukuddem-Petersen dan Petersen, 2008). Anggapan di masyarakat bahwa bank merupakan industri yang paling banyak diatur, dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini karena apabila bank mengalami kesulitan maka pemilik (pemegang saham) merupakan pihak yang paling kecil mengalami kerugian. Terdapat pihak lain dalam jumlah banyak tetapi dalam nominal kecil yang sangat rentan terhadap risiko.

Regulasi perbankan terkait dengan institusi perbankan serta produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh bank. Tujuan regulasi pada industri perbankan adalah untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk-produk dari industri perbankan tersebut. Regulasi yang dilakukan terhadap bank berbeda dengan regulasi terhadap industri lain. Jika pada industri lain regulasi pada umumnya menyangkut terstandarisasi produk dan persiapan usaha, regulasi pada industri perbankan mencakup keseluruhan bank secara komprehensif (Idroes, 2008).

Industri keuangan khususnya perbankan merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi dominan dalam tatanan perekonomian. Sebegitu pentingnya usaha perbankan tersebut sehingga dalam operasional bank, regulasi yang harus ditaati cukup ketat. Selain hal tersebut, bank yang berfungsi sebagai intermediasi di tengah masyarakat melalui mengelola dana dan menyalurkan kembali perlu dikelola secara profesional. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Ini terutama terkait dengan bagaimana sebaiknya bank mengelola risiko dan perilaku organisasi bank yang baik. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistemik akan mengganggu kegiatan suatu perekonomian.

Sejak awal 1990, khususnya setelah deregulasi perbankan di Indonesia, lingkungan usaha sebuah bank mengalami banyak perubahan, lingkungan yang awalnya relatif stabil, sederhana, padu dan ramah, selanjutnya sedang dan terus bergerak ke arah lingkungan yang dinamis, kompleks, terdiversifikasi dan keras atau berseteru. Proses perubahan ini telah menjadi salah satu pemicu dari semakin tingginya intensitas risiko yang timbul dari kegiatan bank (Tampubolon, 2004).

3. Good Corporate Governance

Penyempurnaan praktek penerapan manajemen risiko dalam perbankan nasional, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bagi perbankan, dengan salah satu butir yang ada di dalam peraturan tersebut mensyaratkan adanya praktek manajemen risiko yang spesifik. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager dkk., 2003). *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan adil, diyakini akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan, manajemen, pekerja, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan ini akan lebih mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen dengan pekerja, manajemen dengan pemegang saham, maupun manajemen dengan pemerintah dan lingkungan sosialnya. Program manajemen risiko merupakan bagian tata kelola perusahaan yang baik, dimana perusahaan memiliki proses organisasi, kebijakan, dan proses pengawasan untuk mengukur dan mengelola risiko perusahaan termasuk menentukan toleransi risiko perusahaan, memastikan kebijakan sistem manajemen risiko dan SDM yang mampu menunjang pencapaian tujuan perusahaan, membentuk organisasi yang jelas pemisahan tugas dan tanggungjawab, mempertajam budaya risiko dan membangun sistem organisasi (Septiani dan Wibowo, 2004).

Keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko dalam suatu bank tidak terlepas dari perilaku organisasi bank dalam menjaiannya. Pemimpin bank sebagai lembaga pembuat kebijakan dan keputusan dituntut mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, beriman dan memahami amanah yang diemban, mengingat bank sebagai institusi yang rentan terhadap kegagalan. Selain pemimpin bank, organisasi dan staf yang terlibat dalam operasional usaha bank juga berperan penting dalam penerapan manajemen risiko di bank. Organisasi di bank selain dituntut efisien dengan berbagai perangkatnya harus memiliki budaya yang sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, skala, kompleksitas dan kemampuan bank itu sendiri.

Kesuksesan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sebuah organisasi bank tidak terletak pada tekniknya saja, tetapi pada manusia pengambil dan pengelola risiko itu sendiri (*human factors*). Bank sebagai sebuah organisasi. Terdapat banyak pegawai dengan karakter, sikap (*attitude*) dan ketrampilan yang berbeda-beda. Keragaman ini menuntut adanya budaya organisasi dimana setiap orang menjadi manajer risiko, yaitu para pegawai yang bertanggungjawab atas kegiatan dan hasilnya. Oleh karena itu salah satu tanggung jawab direksi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko, yaitu mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Beberapa organisasi mengindikasikan bahwa pengembangan budaya manajemen risiko lebih penting dibandingkan membangun sebuah kebijakan dan prosedur

manajemen risiko yang paling lengkap sekalipun. Alasannya yaitu pengelolaan risiko harus diimplementasikan ke dalam filosofi manajemen dan budaya organisasi yang dimuai dari bawah akan dengan mudah dan cepat menyebar ke manajemen senior pada organisasi.

4. Pengaruh Regulasi pada Manajemen Risiko

Manajemen risiko juga bergantung pada kemampuan pengelola bank (Dewan Komisaris dan Direksi) dalam mematuhi semua ketentuan hukum maupun regulasi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Pengelola bank wajib memiliki pengetahuan dasar sebagai penanya yang cerdas (*intelligent questioners*) terhadap semua risiko yang diambil oleh bank yang mereka kelola, dan sebagai penilai apakah sistem manajemen risiko yang telah ada memungkinkan mereka menjalankan tugas sebagai pengawas (*oversight*) atas semua kegiatan bank yang berisiko berikut pengeioaian risiko yang ada secara efektif (Spira dan Page, 2003).

Pemilihan aturan manajemen pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 dikarenakan aturan ini merupakan aturan yang berlaku mengenai keharusan penerapan aturan manajemen risiko pada bank umum di Indonesia. Peraturan ini juga merupakan salah satu penerapan dari regulasi perbankan internasional dalam manajemen risiko perbankan yang dikenal dengan Basel II. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan regulasi perbankan berpengaruh positif pada manajemen risiko.

5. Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Hubungan Regulasi dan Manajemen Risiko

Strategi membangun perbankan yang sehat dilakukan dengan mendorong *intern governance* bank yang sehat dan penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif. Melalui mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, diharapkan mendorong penciptaan disiplin pasar dan peningkatan kompetisi antara melalui penyempurnaan peraturan yang ada. Satu hal yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan ketentuan kehati-hatian yang terkait dengan perluasan kualitas aktiva produktif sesuai dengan standart perbankan internasional.

Menurut Gup (2007) banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku organisasi terutama terkait dengan *Corporate Governance* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Diantaranya adalah Gomper et al. (2003), Agarwaldan Williamson (2006) yang menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang lebih ketika perilaku organisasi dan manajemen

risikonya lebih baik yaitu taat terhadap prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung sekaligus memberi bukti empiris bahwa bank yang perilaku organisasinya semakin baik akan meningkatkan manajemen risiko yang lebih baik (Dalgeish dan Barry, 2005). Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang mendukung, dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Impementasi *good corporate governance* berpengaruh positif pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlokasi Kotamadya Denpasar. Beberapa alasan pemilihan lokasi di Kotamadya Denpasar yaitu: 1) sebanyak 22 BPR atau sebesar 16,06% dari seluruh BPR di Bali berada di Kotamadya Denpasar; 2) Kotamadya Denpasar merupakan pusat pemerintahan sehingga memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

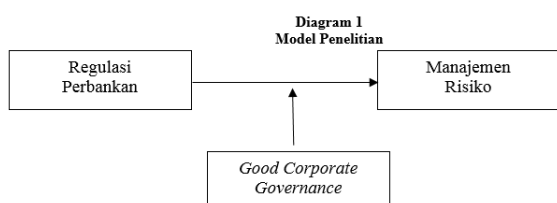
Nama	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Manajemen risiko	Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang mencakup: identifikasi, mengukur, menilai, mengontrol dan memantau risiko-risiko yang ada dari kegiatan usaha bank. Risiko perbankan mencakup: 1. Risiko Reputasi 2. Risiko Strategi 3. Risiko Kepatuhan 4. Risiko Kredit 5. Risiko Pasar 6. Risiko Likuiditas 7. Risiko Operasional 8. Risiko Hukum	Skala ordinal yang diukur dengan Skala Likert 5 poin.
<i>Good corporate governance</i>	Merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Mencakup lima indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran	Skala ordinal yang diukur dengan Skala Likert 5 poin.
Regulasi perbankan	Merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan otoritas (Bank Indonesia) seperti pemenuhan modal minimum (CAR), ketentuan batas maksimum pemberina kredit (BMPK), ketentuan giro minimum (GWM), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Skala ordinal yang diukur dengan Skala Likert 5 poin.

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2016)

C. Model Penelitian

Diagram 1 berikut ini merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Diagram 1
Model Penelitian



Sumber: hasil pemikiran peneliti (2016)

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian survei untuk menganalisis peran *Good Corporate Governance* pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner untuk komisaris BPR di Kotamadya Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh BPR di Kotamadya Denpasar yaitu 22 BPR yang masing-masing BPR memiliki 2-3 orang komisaris.

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai informasi demografis responden.

2. Bagian kedua berisi daftar pernyataan mengenai (1) regulasi perbankan (2) *good corporate governance*, dan (3) manajemen risiko.
3. Semua pernyataan diukur menggunakan skala interval, yaitu lima skala Likert.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Partial Least Square (PLS)* versi 2.0 M3. Prosedur PLS memungkinkan analisis dilakukan ketika indikator dalam skala kategori yang berbeda pada model yang sama (Ghozali, 2008). Selain itu, prosedur PLS memungkinkan dapat dilakukannya spesifikasi

hubungan diantara konsep faktor yang diteliti dan ukuran masing-masing konstruk. Pengujian signifikansi hubungan antar konstruk dilakukan dengan menggunakan prosedur *bootstrap resampling*. Hasil dari prosedur *bootstrap resampling* ini menunjukkan validitas dan reliabilitas data, dan sekaligus signifikansi hubungan antar konstruk.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Demografi Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 33 orang yang berkedudukan sebagai komisaris BPR.

Tabel 3
Karakteristik Demografi Responden

No	Karakteristik	Jumlah
1	Jenis Kelamin:	
	- Laki-laki	29
	- Perempuan	4
	Total	33
2	Usia:	
	- 20 sampai dengan 30 Tahun	1
	- 31 sampai dengan 40 Tahun	2
	- 41 sampai dengan 50 Tahun	6
	- Diatas 50 Tahun	24
	Total	33
3	Pendidikan:	
	- SMU	6
	- D1/D3	1
	- S1	20
	- S2	5
	- S3	1
	Total	33
4	Lama Bekerja:	
	- 1 sampai dengan 5 Tahun	12
	- 6 sampai dengan 10 Tahun	9
	- 11 sampai dengan 15 Tahun	5
	- Diatas 15 Tahun	7
	Total	33

B. Outer Model

Loading factor yang dihasilkan semua item/ indikator konstruk sangat baik jika nilainya lebih

besar dari 0,7 (Ghozali, 2014; 259). Hasil analisis dari *Combined loadings* dan *cross loadings* ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Outer Model (Weights of Loading)

Regulasi	Nilai Loading	Manajemen Resiko	Nilai Loading	GCG	Nilai Loading
X1.3	0.833	Y1.1	0.961	M1.2	0.760
X1.4	0.954	Y1.2	0.927	M1.3	0.870
X1.5	0.837	Y1.3	0.957	M1.4	0.817
X1.6	0.790	Y1.4	0.908	M1.6	0.851
X1.7	0.832			M1.7	0.833
X1.8	0.803			M1.8	0.781
X1.9	0.852			M1.9	0.899
X1.10	0.868			M1.10	0.837
X1.11	0.717			M1.12	0.691
X1.12	0.910			M1.13	0.816
X1.13	0.880			M1.14	0.832
X1.14	0.749			M1.15	0.765
X1.16	0.959			M1.16	0.874
X1.17	0.746			M1.17	0.773
X1.18	0.868			M1.20	0.868
X1.19	0.911			M1.21	0.753
X1.21	0.851			M1.22	0.868
X1.22	0.929			M1.24	0.763
X1.23	0.722				

Berdasarkan hasil analisis, item/konstruk X1.1 , X1.2 , X1.15 , X1.20 dan X1.24 beserta M1.1 , M1.5, M1.11, M1.18, M1.19 , M1.23 dikeluarkan dari model karena nilai loading factornya lebih kecil dari 0,7.

C. Model Fit and Quality Indices

Pengujian model dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5

Tabel 5
Model Fit dan Quality Indices

Pengukuran	Kriteria	Nilai	Keterangan
Model Fit:			
Average path coefficient (APC)	P<0.001	0.420	Model fit
Average R-squared (ARS)	P<0.001	0.684	Model fit
Average adjusted R-squared (AARS)	P<0.001	0.663	Model fit
Multikol:			
Average block VIF (AVIF)	<= 5, ideally <= 3.3	7.905	Terjadi Multikol
Average full collinearity VIF (AFVIF)	<= 5, ideally <= 3.3	5.853	Terjadi Multikol
Tenenhaus GoF (GoF)	small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36	0.743	Large
Sympson's paradox ratio (SPR)	>= 0.7, ideally = 1	1.000	Tidak terjadi kausalitas didalam model
R-squared contribution ratio (RSCR)	>= 0.9, ideally = 1	1.000	Tidak terjadi kausalitas didalam model
Statistical suppression ratio (SSR)	>= 0.7	1.000	Tidak terjadi kausalitas didalam model
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	>= 0.7	1.000	Tidak terjadi kausalitas didalam model

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Model memiliki fit yang baik dilihat dari nilai P Value untuk APC, ARS dan AARS lebih kecil dari 0.001 dengan nilai APC = 0,420 , nilai ARS = 0.684 dan nilai AARS = 0,663
2. Terjadi gejala multikolinieritas karena nilai AVIF dan AFVIF > 3.3. Hal ini terjadi karena dengan interaksi (mengalikan sesama variabel independen) maka kemungkinan besar akan terjadi multikolinieritas. Maka dengan model interaksi, gejala multikolinieritas dapat diabaikan.
3. Nilai GoF = 0,743 > 0,36 berarti fit model yang dibangun sangat baik
4. Nilai SPR, RSCR & SSR = 1 maka tidak ada terdapat masalah kausalitas di dalam model yang dibangun.

D. Laten Variable Coefficient

Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai R². Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,684, yang artinya variasi besar kecilnya manajemen resiko, 68,4% dipengaruhi oleh regulasi sedangkan sisanya sebesar 31,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.

E. Average Variances Extracted

Setiap konstruk dikatakan sangat baik jika nilai dari AVE lebih besar dari 0,5. Hasil Analisis ditunjukkan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Average variances extracted

Regulasi	Manajemen Risiko	GCG	GCG*Regulasi
0,715	0,881	0,665	0,972

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai AVE setiap konstruk (0.715, 0.881, 0.665 dan 0.972) lebih besar dari 0,5 sehingga memenuhi validitas konvergen.

F. Composite Reliability Coefficients

Pengujian reliabilitas dapat dilihat dari nilai *composite reliability*, dengan ketentuan nilainya harus lebih besar dari 0,7. Hasil analisis pengujian reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Composite Reliability Coefficients

Regulasi	Manajemen Risiko	GCG	GCG*Re
0.979	0.967	0.973	1.000

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* adalah sebesar 0.979, 0.976, 0.973 dan 1 yang lebih besar dari nilai 0.7 sehingga memenuhi reliabilitas konsistensi internal.

G. Q-squared coefficients

Tabel 8
Q-squared coefficients

Regulasi	Manajemen Risiko	GCG	GCG*Regulasi
	0.634		

Nilai *Q squared* variabel Manajemen resiko adalah sebesar 0.634 lebih besar dari 0 yang berarti model mempunyai *predictive relevance*.

H. Path Coefficient Dan P-Value

Tabel 9
Path Coefficient

Regulasi	Manajemen Risiko	GC G	GCG*Reg
Regulasi	0.546		
Manajemen Risiko			-0.293
GCG			
GCG*Regulasi			

Tabel 10
P-Value

Regulasi	Manajemen Risiko	GC G	GCG*Reg
Regulasi	<0.001		
Manajemen Risiko			<0.002
GCG			
GCG*Regulasi			

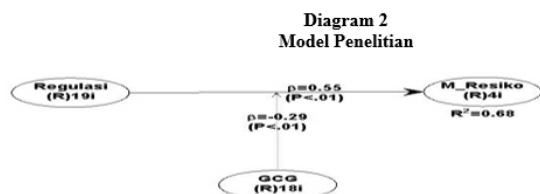
Dari hasil *ouput path coefficient* dan p-value diatas, dapat dilihat bahwa:

1. Variabel regulasi berpengaruh secara langsung terhadap manajemen resiko dengan nilai P-Value < 0,001 dan nilai *path coefficientnya* = 0,546.
2. Interaksi antara regulasi dengan variabel moderator GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen resiko dengan nilai P Value < 0.002 dengan nilai *path coefficient* -0.293 (tanda pada *path coeffi-*

cient berbeda cenderung mengakibatkan kesalahan type I, yaitu hasil yang tidak signifikan dinyatakan signifikan). Ini berarti GCG bukan sebagai variabel moderasi.

I. Model Penelitian

Dengan memasukkan data mentah mengenai regulasi, manajemen risiko dan GCG maka diperoleh model Warp PLS sebagai berikut:



J. Pembahasan

1. Pengaruh Regulasi pada Manajemen Resiko

Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8, variabel regulasi berpengaruh secara langsung terhadap manajemen resiko dengan nilai P-Value < 0,001 dan nilai *path coefficient*nya = 0,546. Pemilihan aturan manajemen pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 dikarenakan aturan ini merupakan aturan yang berlaku mengenai keharusan penerapan aturan manajemen risiko pada bank umum di Indonesia. Peraturan ini juga merupakan salah satu penerapan dari regulasi perbankan internasional dalam manajemen risiko perbankan yang dikenal dengan Basel II.

2. GCG pada hubungan Regulasi dengan Manajemen Resiko

Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8, interaksi antara regulasi dengan variabel moderator GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen resiko dengan nilai P Value < 0.002 dengan nilai *path coefficient* -0.293 (tanda pada *path coefficient* berbeda cenderung mengakibatkan kesalahan type I, yaitu hasil yang tidak signifikan dinyatakan signifikan). Ini berarti GCG bukan sebagai variabel moderasi. Alasan mengapa GCG bukan sebagai variabel moderasi adalah karena perbankan tunduk pada aturan OJK dimana mengharuskan diterapkannya manajemen risiko sehingga good corporate governance tidak akan dapat mempengaruhinya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Variabel regulasi berpengaruh secara langsung terhadap manajemen resiko. Adanya aturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 yang mengatur mengenai keharusan penerapan aturan manajemen risiko pada bank umum di Indonesia.

2. *Good Corporate Governance* tidak mampu memoderasi pengaruh regulasi terhadap manajemen risiko.

B. Saran

Bagi perbankan diharapkan untuk terus meningkatkan peran manajemen risiko agar menghindarkan bank dari risiko-risiko perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Aggarwal, R. and Williamson, R. 2006. Did new regulations target the relevant corporate governance attributes?

Bank Indonesia. 2003. *Perkembangan Jumlah Bank di Indonesia* (minus BPR).

Cade, Eddie. 1997. *Managing Bank Risk*. TJ International Ltd, Cornwall, England

Dalgieish, Fraser dan J. Cooper, Barry. 2005. Risk management: developing a framework for a water authority. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, Vol. 16 Iss. 3: 235 - 249.

Gompers, P., and Ishii, J., Metrick, A. 2003. Corporate governance and equity prices. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1): 107-155.

Gup, Benton E. 2007. *Corporate governance in banking: a global perspective*. Edward Eigar Publishing.

Husein, Yunus. 2003. *Rahasia Bank: Privasi versus Kepentingan Umum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Idroes, F.N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta

Idroes, F. N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Lindgren, Carl-Johan, Gillian Garcia and Matthew I. Saal. 1996. *Bank Soundness and Macroeconomic Policy*. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Mukuddem-Petersen dan Petersen, 2008

Sartono, Agus. 2000. *Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.

Septiani, Mery Selvi, dan Wibowo. 2004. Pengaruh Antara Penerapan Manajemen Risiko terhadap Implementasi Good Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Trisakti Jakarta.

Siahaan, Hinsa. 2007. *Manajemen Risiko: Konsep*,

- Kasus, Implementasi*. Elex Media Komputindo.
- Spira, Laura F dan Michael Page. 2003, Risk Management The Reinvention of internal control and the changing role of internal audit. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol 16, 4: 640-661.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management: Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Cetakan Pertama, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. 2003. Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI).
- Warjiyo, P. 2006. Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Teori dan Praktek di Indonesia. *Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia*. Manado.